

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis mengenai topik penelitian ini yang membahas mengenai sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Adapun pengertian sistem pengendalian intern yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

Mahmudi (2016:251) menjelaskan sistem pengendalian intern adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini (2011:213) adalah :

"Merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini, yaitu: a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Menurut V wiratna Sujarweni (2015:69) yaitu :

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang di buat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang, serta proses yang integral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian inten harus diterapkan dengan baik jika ingin dicapai esensinya, dan untuk itu perlu diterapkan bahwa manajemen puncaklah yang memiliki peran terbesar disini. Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) sebagai berikut:

- 1) “Untuk melindungi asset (termasuk data) negara.
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku”.

2.1.1.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut V wiratna Sujarweni (2015:71) ada 5 komponen pengendalian intern, yaitu :

- 1) “Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian intern yang baik
- 2) Penaksiran Risiko
Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang di hadapi oleh perusahaan.

- 3) **Aktivitas Pengendalian**
Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan
- 4) **Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi**
Sistem informasi dan komunikasi terdiri atas metode-metode dan catatan-catatan yang diadakan untuk mencatat, memproses, meringkas dan melapor transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas dan aktiva-aktiva, hutang-hutang terkait.
- 5) **Pemantauan**
Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang di harapkan dapat segera di ambil tindakan”.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim (2014:83) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset”.

Menurut Erlina (2015:5) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Sementara menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat

transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”.

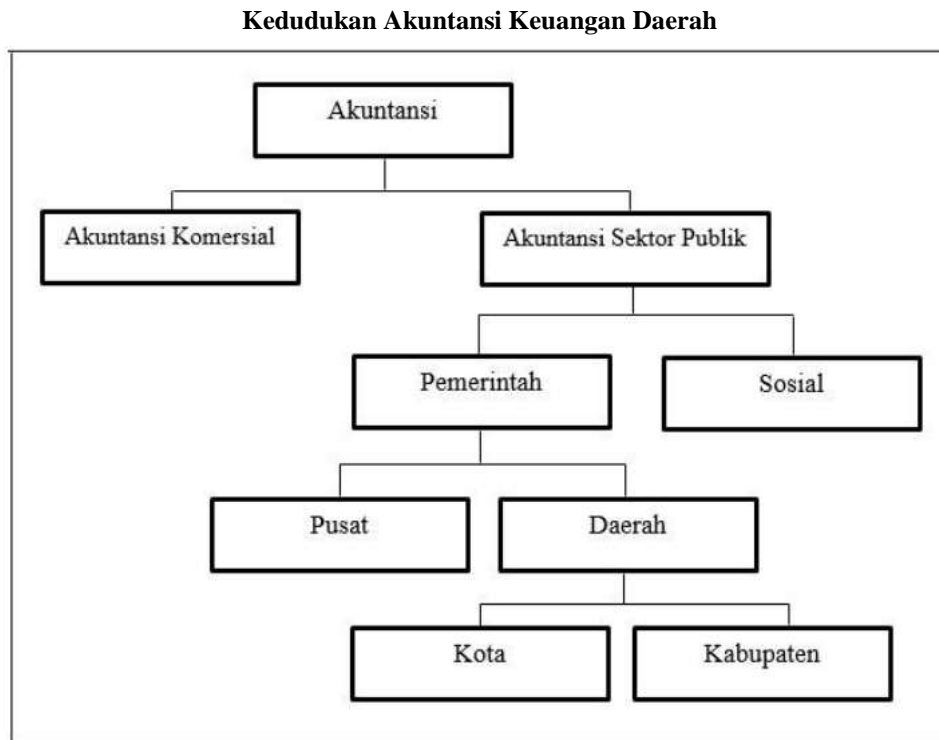
Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual maupun komputerisasi.

2.1.2.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina (2015:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina (2015:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

- 1) “Akuntansi Komersial Perusahaan Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.
- 2) Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas :
 - a) Akuntansi Pemerintahan Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.
 - b) Akuntansi Sosial Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat”.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Erlina, dkk (2015:3)

Gambar 2.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.3 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina (2015:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

- 1) “*Single entry*”
- 2) *Double entry*
- 3) *Triple entry*”

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

- 1) “*Single Entry*
Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.
- 2) *Double Entry*
Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan *double entry*.
- 3) *Triple Entry*
Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa

setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.2.4 Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa:

“Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

- 1) “Akuntansi berbasis kas
- 2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual
- 3) Akuntansi berbasis akrual”

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- 1) “Akuntansi berbasis kas
Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.
- 2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual
Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005)
- 3) Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.2.5 Siklus Akuntansi

Menurut Abdul Halim (2014:56) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem mengelolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:6) mengemukakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi”.

Sementara menurut Nurlan Darise (2008:41) mengemukakan bahwa:

“Untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi”.

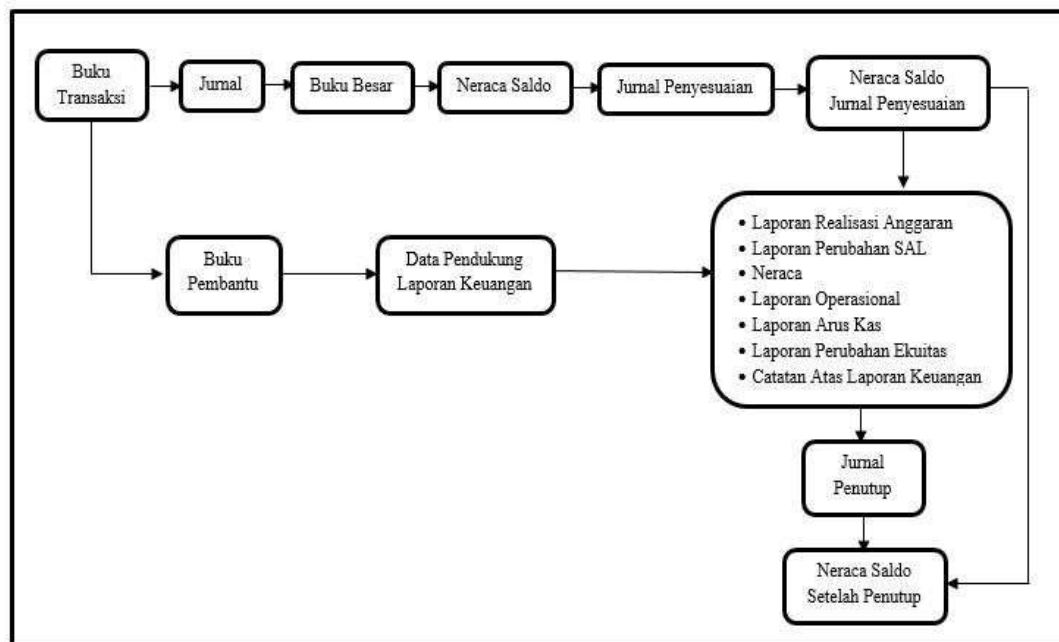
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2015:6) sebagai berikut:

- 1) “Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
- 2) Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
- 3) Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting atau mengakunkan.
- 4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
- 5) Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru (up to date).
- 6) Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya kedalam neraca saldo setelah disesuaikan.
- 7) Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
- 8) Menutup buku besar.
- 9) Menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku”.

Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti Gambar 2.2 berikut ini:

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina, dkk (2015:7)

Gambar 2.2
Siklus Akuntansi keuangan Daerah

2.1.2.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim (2014:83):

- 1) “Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan”

Adapun penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) “Pencatatan
 - a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

- c) Memindahbukukan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
- 2) Pengikhtisaran
- a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
 - b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
 - c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
 - d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
 - e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- 3) Pelaporan
- a) Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan”.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Adapun pengertian kualitas dan laporan keuangan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Erlina, dkk (2015:19) mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:26) sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah”.

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Pengolahan data keuangan perusahaan diawali dari bukti-bukti transaksi yang berupa faktur, dokumen, nota, kuitansi dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya dan kemudian dicatatkan dalam pembukuan perusahaan sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian bukti itu akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi dan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang memerlukannya.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Erlina, dkk (2015:20) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina, dkk (2015:8) dan Mahmudi (2010:11) Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- 1) “Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami”

Adapun penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) “Relevan.
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:
 - a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu.
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap.
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) menjelaskan sistem pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya salah satunya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan.

Mahmudi (2016:251) menyatakan instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2010: 19) menyatakan bahwa mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh penelitian Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, dkk (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, menurut Jonny M. Situmorang (2016) hasil penelitiannya menunjukkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan arah hubungan yang positif.

Berdasarkan pemaparan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Pramono Hariadi (2013:131) mengemukakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai.

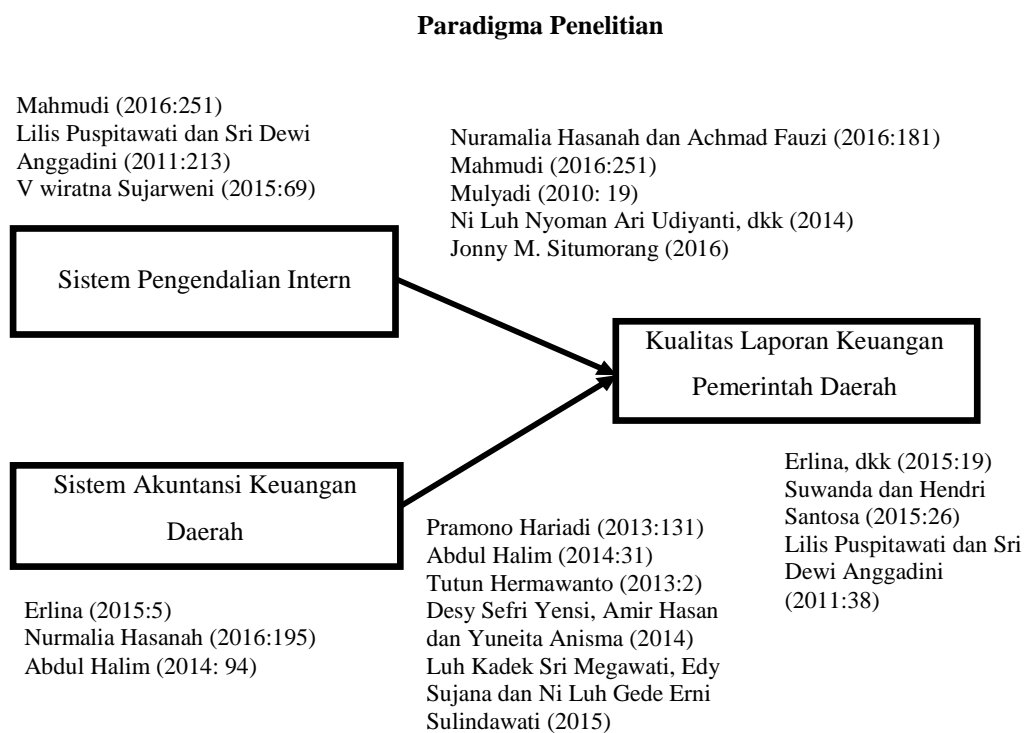
Adapun menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Menurut Tutun Hermawanto (2013:2) mengemukakan bahwa keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Dari hasil penelitian Desy Sefri Yensi, Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah satu kesatuan yang apabila diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterpkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni releva, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Hasil penelitian Luh Kadek Sri Megawati, Edy Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2015) menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat digambarkan paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan antar variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:114) hipotesis penelitian adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H1 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.